

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Titik berat otonomi daerah yang diletakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Tidak konsisten diterapkan didasarkan pada sistem panas bumi memiliki karakter unik terutama dalam hal keberadaanya yang bersifat lintas daerah administratif. Dan mengalami pergeseran secara mikro, yakni kewenangan pengelolaan panas bumi dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Semestinya dilandaskan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan penghindaran eksternalitas. Serta kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dikesampingkan. Menunjukan Pemerintah Provinsi tidak otonom untuk mengelola potensi panas bumi yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dengan kewenangan terbatas melalui tugas pembantuan.

Dalam pemanfaatan kawasan hutan taman nasional terkait pemanfaatan tidak langsung panas bumi untuk keperluan energi listrik dalam kawasan hutan taman nasional. Pemerintah pusat telah melakukan serangkain sinkronisasi. Ditunjukan dengan diterbitkannya pelbagai perubahan peraturan perundang-undangan terkait beserta peraturan turunannya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu menyelesaikan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam hal ini, kawasan hutan taman nasional dipersiapkan sebagai kawasan cadangan pembangunan. Dalam rangka efektivitas pemenuhan target energi listrik sesuai

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 secara tepat waktu. Kemudian, baik Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten. Perlu melakukan studi kelayakan kembali. Dengan melibatkan masyarakat sekitar Gunung Ciremai baik pro maupun kontra tidak hanya pada tahap sosialisasi saja. Sebagai media informasi dan diseminasi yang disebarluaskan secara berkala baik cetak maupun elektronik. Memperhatikan dinamika yang terjadi justru lebih sering terjadi di luar rencana yang ada, yakni telah tercukupinya energi listrik di Kabupaten Kuningan, wilayah Kabupaten Kuningan tidak eksplisit dinyatakan dalam jaringan pembangkitan tenaga listrik di Jawa Barat dan adakalanya disertai penolakan. Khususnya menyangkut program strategis nasional yang direncanakan akan dilakukan oleh salah satu badan usaha milik negara. Melalui penunjukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ateng Syafrudin, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Amrah Muslimin, 1980, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah dan Daerah*, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Candra Kusuma, 2013, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum, Seri Hukum dan Keadilan Sosial*, Epistema Institute, Depok.
- Daryanto dan Asma Karim, 2015, *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Cetakan Pertama, Depublish, Yogyakarta.
- Dewan Energi Nasional, 2015, *Outlook Energi 2015*, Jakarta.
- Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, 2016, *Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Di Hutan Konservasi*, Bogor.
- Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, 2017, *Potensi Panas Bumi Jilid 1*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2010, *Profil Potensi Panas Bumi Daerah Gunung Ciremai dan Sekitarnya Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- F. Isjawara, 1992, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung.
- Juniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, 2015, *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015-2024*, Jakarta.
- Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, 2015, *Statistik Ketenagalistrikan 2015*, Jakarta.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016, *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara 2016-2025*, Jakarta.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017, *Kinerja 3 Tahun Kabinet Kerja Pemberdayaan dan Keberpihakan Untuk Mengatasi Ketimpangan*, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2013, *Dokumen Ringkasan Pengelolaan, 2014, Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd.* Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2013, *Dokumen Ringkasan Pengelolaan, 2013, Chevron Geothermal Salak, Ltd.* Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-10, Jakarta.
- Sulistiyowati Irianto, Jan Michele Otto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoler dan Julia Arnscheidt, 2012, *Kajian Sosio-Legal, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerjemah Tristam Moeliono, Pustaka Larasan, Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta.
- Sulistiyowati Irianto, Shidarta, Widodo Dwi Putro, Soetandyo Wignjosebroto, Bernard Arief Shidarta, Lim Sieng Meij dan Kristi Poerwandari, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Siraddjudin, Anis Ibrahim, Shinta Hardiyanti dan Catur Wido Haruni, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.

Tuti Ermawati dan Siwage Dharma, 2014, *Pengembangan Energi Alternatif: Studi Kasus Energi Panas Bumi Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Press, Jakarta.

Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional, 2014, *Rencana Strategis Taman Nasional Gunung Ciremai 2010-2014*, Kuningan.

Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

Ryass Rasyid, Syaukani HR dan Afan Gafar, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar dan PUSKAP, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah:

Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Dies Natalis, Seperempat Abad Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 1981.

Canggih Prabowo, "Aspek Hukum dan Ekonomi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan Paska Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pengusahaan Panas Bumi dalam Kawasan Hutan di Jawa Barat)", *Prosiding Simposium Nasional Hukum Tata Negara*, 8 Juni 2015.

Canggih Prabowo, "Koordinasi Kewenangan pada Pengusahaan Panas Bumi untuk Keperluan Tenaga Listrik", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.

Canggih Prabowo, "Resentralisasi Dalam Pembagian Kewenangan Pemanfaatan Energi Panas Bumi", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Volume 2 Nomor 2, Universitas Katolik Parahyangan, 2016.

Herlambang Perdana Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya", *Digest Epistema*, Volume 6 Tahun 2016.

Indra Perwira, "Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

Philipus M Hadjon, "Tentang Wewenang", *Majalah Yuridika* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 5&6 Edisi September s/d Desember, 1997.

Internet:

Administrator, 2017, Revisi UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya Jadi Usul Inisiatif DPR, (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18555>, diakses pada tanggal 05 Desember 2017).

Administrator, 2017, BTNGC Sukses lakukan Konsultasi Publik Review Zonasi, (<http://tngciremai.com/2017/09/btngc-sukses-lakukan-konsultasi-publik-review-zonasi/>, di akses pada tanggal 10 September 2017).

Administrator Perusahaan Daerah Air Minum, 2017, Sumber Air Kabupaten Kuningan, (<http://pdamkuningan.co.id/info/sumber-air>, diakses pada tanggal 01 Desember 2017).

Administrator, 2016, Pengumuman Lelang Kembali WKP Gunung Ciremai, (<http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/11/16/1434/pengumuman.lelang.wilayah.kerja.panas.bumi.wkp.gunung.ciremai>, diakses pada tanggal 16 November 2016).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2014, Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan, (<http://bappeda.kuningankab.go.id/materi/rpjmd/1.+KLHS+KUNINGAN.pdf>, diakses pada tanggal 16 Desember 2017).

Fauzul Muna, 2015, Chevron Mundur dari Ciremai, (<http://industri.bisnis.com/read/20150127/44/395426/chevron-mundur-dari-ciremai>, diakses pada tanggal 28 Januari 2015).

Ferial, 2016, Koordinasi Pengembangan WKP Ciremai, (<http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/09/19/1349/koordinasi.pengembangan.wkp.ciremai>, diakses 20 September 2016).

Ferial, 2017, Untuk WKP Gn. Ciremai Pemerintah Akan Terbitkan SK Penugasan, (<http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/01/10/1518/untuk.wkp.gn.ciremai.pemerintah.akan.terbitkan.sk.penugasan>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Keberhasilan Provinsi Jawa Barat Mengembangkan Panas Bumi

(<http://www3.esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/3227-keberhasilan-provinsi-jawa-barat->, diakses pada tanggal 13 Maret 2017).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015, Pemanfaatan Listrik Energi Baru Terbarukan Mencapai 8.503 Mwe, (<http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/09/1003/2015.pemanfaatan.listrik.ebt.mencapai.8.503.mw>, diakses pada tanggal 12 Januari 2015).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016, Tanpa Pertumbuhan Pembangkit 2018 Pulau Jawa Krisis Listrik, (<http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2016).

Maria Rosari, Pakde Ajukan Uji Materi UU Panas Bumi (<https://jatim.antarane.ws.com/berita/173221/pakde-ajukan-uji-materi-uu-panas-bumi>, diakses pada tanggal 24 Februari 2016).

Nuryaman, 2016, Sosialisasi Geothermal Gunung Ciremai Diwarnai Penolakan (<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/10/20/sosialisasi-geothermal-gunung-ciremai-diwarnai-penolakan-382762>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2016).

PABUMNews, 2017, Daerah Penghasil Dapatkan Bonus Produksi Panasbumi, (<https://www.panasbuminews.com/berita/daerah-penghasil-dapatkan-bonus-produksi-panasbumi/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2017).

Reni Susanti, 2016, Eksplorasi Panas Bumi di Sukabumi Dimulai September, (<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/10/110000226/Eksplorasi.Panas.Bumi.di.Sukabumi.Dimulai.September>, diakses pada tanggal 10 September 2016).

Setiawan Adiwijaya, 2014, Kementerian ESDM Bantah Gunung Ciremai Dijual, (<https://bisnis.tempo.co/read/559738/kementerian-esdm-bantah-gunung-ciremai-dijual>, diakses pada tanggal 04 Maret 2014).

Tempo.co, 2017, Kembangkan Energi Terbarukan, Jabar Raih Penghargaan (<https://nasional.tempo.co/read/910092/kembangkan-energi-terbarukan-jabar-raih-penghargaan>, diakses pada tanggal 18 September 2017).

Wisnu Wage Pamungkas, 2012, Penyertaan: Pemprov Jabar Incar Saham di Proyek PLTP Ciremai, (<http://industri.bisnis.com/read/20120416/44/72738/penyertaan-pemprov-jabar-incar-saham-di-proyek-pltp-ciremai>, diakses pada tanggal 27 Januari 2014).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri dari: Perekonomian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9).
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17).
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D. Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kuningan Nomor 57 Tahun 2011).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 831).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164).
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1937 K/30/MEM/2007 tentang Wilayah Kerja Pertambangan Cisolok-Cisukarame.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral K/30/MEM/2011 tentang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Gunung Ciremai.

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 401/KN/2017 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 Panas Bumi dan Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945